

Tinjauan Penyajian Laporan Keuangan Berdasarkan SAK-EMKM pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan

B. Nuranisa Pertiwi^{1*}, Muhammad Yahya², dan Warka Syachbrani³

¹ Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

² Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

³ Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar

ABSTRACT

The purpose of this study is to analysis of presentation of Koperasi Indonesia financial statement Based on SAK-EMKM. The data obtained by using interview and documentation techniques. The data analysis technique used is descriptive analysis, which is comparing existing theories with actual practice so that conclusions can be drawn. The research was conducted at Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan. The results of the study conclude that the presentation of cooperative financial statements is not in accordance with SAK-EMKM because the information presented is incomplete. Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan has not yet prepared a cash flow report. The balance sheet has been prepared in the correct format. The balance sheet is presented in a comparison of the last two years. However, there were an unreasonable number of accounts receivable in the current period. In addition, in the presentation of PHU, income was not differentiated from members and non-members.

Tujuan penulisan ini adalah untuk menganalisis penyajian Laporan Keuangan Koperasi Berdasarkan SAK-EMKM. Data yang diperoleh dengan menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis deskriptif yaitu membandingkan antara teori yang sudah ada dengan praktek yang sesungguhnya sehingga akan dapat ditarik kesimpulan. Penelitian dilaksanakan pada Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa penyajian laporan keuangan koperasi belum sesuai SAK-EMKM karena informasi yang disajikan tidak lengkap. Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan belum menyusun laporan arus kas. Neraca telah disusun dengan format yang benar. Neraca disajikan dalam perbandingan dua tahun terakhir. Namun terdapat jumlah angka rekening piutang yang tidak wajar pada periode berjalan. Selain itu, dalam penyajian PHU tidak dibedakan pendapatan dari anggota dan non-anggota.

Keywords:

micro-small-medium enterprise, presentation of financial statement
Koperasi Indonesia, penyajian laporan keuangan, SAK UMKM

* Corresponding Author at Program Studi Akuntansi, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Amkop Makassar, Jl. Meranti No. 1 Panakkukang, Makassar 90321 South Sulawesi, Indonesia.
E-mail address: nuranisa.pertiwi@yahoo.com (author#1)

1. PENDAHULUAN

Di Indonesia terdapat tiga pelaku perekonomian nasional, yaitu swasta, pemerintah dan koperasi. Koperasi mempunyai kedudukan dan peranan yang sama dengan badan-badan usaha lain di dalam pembangunan, khususnya di sektor ekonomi. Tujuan koperasi adalah untuk memajukan kesejahteraan anggota pada khususnya, dan masyarakat pada umumnya, serta ikut membangun tatanan perekonomian nasional dalam rangka mewujudkan masyarakat yang maju, adil, dan makmur berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Koperasi dibentuk dan dikelola secara demokratis untuk memenuhi kebutuhan anggota tanpa menjadikan laba sebagai tujuan utama karena koperasi didirikan untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi para anggotanya. Karakteristik koperasi yang membedakannya dengan badan usaha lain adalah anggota koperasi memiliki identitas ganda yaitu anggota sebagai pemilik dan sekaligus pengguna jasa koperasi.

Salah satu aspek yang penting dalam suatu organisasi maupun badan usaha adalah aspek keuangan. Koperasi merupakan salah satu organisasi yang walaupun tujuan utamanya bukan untuk memperoleh laba sebesar-besarnya tetapi mempunyai aktivitas usaha. Laporan keuangan sebagai produk akhir dari proses akuntansi, merupakan salah satu sumber informasi yang penting guna pengambilan keputusan, perencanaan, maupun pengendalian disamping fungsinya sebagai alat pertanggungjawaban. Dengan demikian akuntansi mempunyai peranan yang penting dalam mencapai tujuan koperasi itu.

Adapun peranan akuntansi dalam mencapai tujuan koperasi adalah dalam hal penyajian laporan keuangan. Untuk dapat melihat kemajuan dari suatu organisasi maupun badan usaha adalah melalui laporan keuangannya. Laporan keuangan tersebut dapat dijadikan pihak koperasi sebagai alat pertanggungjawaban, penilaian kinerja, pengambilan keputusan serta pengawasan. Laporan keuangan tersebut dibuat guna memenuhi kebutuhan koperasi itu sendiri. Agar dapat dimanfaatkan secara optimal, laporan keuangan tersebut harus disusun berdasarkan standar akuntansi yang berlaku umum.

SAK EMKM merupakan standar akuntansi keuangan yang lebih sederhana dibandingkan dengan SAK ETAB karena mengatur transaksi yang umum dilakukan oleh EMKM. Dasar pengukurannya murni menggunakan biaya historis, sehingga EMKM cukup mencatat aset dan liabilitas sebesar biaya perolehannya. Pernyataan ini mencakup pengaturan mengenai pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan dalam laporan keuangan.

Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan belum melakukan pembukuan dalam pelaporan keuangannya sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Koperasi ini

hanya membuat laporan keuangan yang berupa neraca dan laporan perhitungan SHU. Berdasarkan hal tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan studi tentang penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan, apakah sudah sesuai dengan SAK-EMKM.

2. REVIU LITERATUR

2.1 Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah

Menurut Syachbrani (2012) pengukuran adalah pengatribusian nilai-nilai numerikal kepada objek atau peristiwa perusahaan sedemikian rupa sehingga memungkinkan penggabungan pos-pos (*aggregation*) seperti total nilai aset, atau pemilahan (*disaggregation*) dari data sesuai dengan kebutuhan. Pentingnya pengukuran dalam akuntansi adalah mengukur laba dengan langkah pertama yaitu menghitung/menilai modal dan kemudian mengkalkulasikan laba sebagai pertukaran dalam modal selama periode akuntansi untuk semua kejadian ekonomi yang mempengaruhi perusahaan.

Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil Menengah No. 1 berisi tentang penyajian laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu penyajian terstruktur dari posisi keuangan dan kinerja keuangan suatu entitas. Catatan informasi keuangan suatu perusahaan pada suatu periode akuntansi yang dapat digunakan untuk menggambarkan kinerja perusahaan tersebut (IAI, 2018).

Penyajian wajar mensyaratkan penyajian jujur atas pengaruh transaksi, peristiwa, dan kondisi lain yang sesuai dengan definisi dan kriteria pengakuan aset, liabilitas, penghasilan, dan beban yang dijelaskan dalam Konsep dan Prinsip Pervasif. Pengungkapan diperlukan ketika kepatuhan atas persyaratan tertentu dalam SAK EMKM tidak memadai bagi pemakai untuk memahami pengaruh dari transaksi, peristiwa, dan kondisi lain atas posisi dan kinerja keuangan entitas.

Penyajian wajar laporan keuangan mensyaratkan entitas untuk menyajikan informasi untuk mencapai tujuan:

- a. Relevan: informasi dapat digunakan oleh pengguna untuk proses pengambilan keputusan.
- b. Representasi tepat: informasi disajikan secara tepat atau secara apa yang seharusnya disajikan dan bebas dari kesalahan material dan bias.
- c. Keterbandingan: informasi dalam laporan keuangan entitas dapat
- d. dibandingkan antar periode untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Informasi dalam laporan keuangan entitas juga dapat dibandingkan antar entitas untuk mengevaluasi posisi dan kinerja keuangan.

- e. Keterpahaman: informasi yang disajikan dapat dengan mudah dipahami oleh pengguna. Pengguna diasumsikan memiliki pengetahuan yang memadai serta kemauan untuk mempelajari informasi tersebut dengan ketekunan yang wajar.

2.1.1 Laporan Posisi Keuangan Informasi Yang Disajikan Berdasarkan SAK-EMKM

Menurut IAI (2018) laporan posisi keuangan entitas dapat mencakup akun-akun berikut: (a) kas dan setara kas; (b) piutang; (c) persediaan; (d) aset tetap; (e) utang usaha; (f) utang bank; (g) ekuitas. Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan posisi keuangan jika penyajian tersebut relevan untuk memahami posisi keuangan entitas. SAK EMKM tidak menentukan format atau urutan terhadap akun-akun yang disajikan. Meskipun demikian, entitas dapat menyajikan akun-akun aset berdasarkan urutan likuiditas dan akun-akun liabilitas berdasarkan urutan jatuh tempo.

2.1.2 Klasifikasi Aset Dan Liabilitas Berdasarkan SAK-EMKM

Entitas dapat menyajikan aset lancar dan aset tidak lancar serta liabilitas jangka pendek dan liabilitas jangka panjang secara terpisah di dalam laporan posisi keuangan. Entitas mengklasifikasikan aset sebagai aset lancar jika:

- a. Diperkirakan akan direalisasi atau dimiliki untuk dijual atau digunakan, dalam jangka waktu siklus operasi normal entitas.
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan.
- c. Diharapkan akan direalisasikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.
- d. Berupa kas atau setara kas, kecuali jika dibatasi penggunaannya dari pertukaran atau digunakan untuk menyelesaikan liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua aset lainnya sebagai tidak lancar. Jika siklus operasi normal entitas tidak dapat diidentifikasi dengan jelas, maka siklus operasi diasumsikan 12 bulan. Entitas mengklasifikasikan liabilitas sebagai liabilitas jangka pendek jika:

- a. Diperkirakan akan diselesaikan dalam jangka waktu siklus normal operasi entitas;
- b. Dimiliki untuk diperdagangkan kewajiban akan diselesaikan dalam jangka waktu 12 bulan setelah akhir periode pelaporan; atau
- c. Entitas tidak memiliki hak tanpa syarat untuk menunda penyelesaian liabilitas setidaknya 12 bulan setelah akhir periode pelaporan.

Entitas mengklasifikasikan semua liabilitas lainnya sebagai liabilitas jangka panjang.

2.1.3 Laporan Laba Rugi Berdasarkan SAK-EMKM

Laporan laba rugi entitas dapat mencakup akun-akun sebagai berikut: (a) pendapatan, (b) beban keuangan, (c) beban pajak. Entitas menyajikan akun dan bagian dari akun dalam laporan laba rugi jika penyajian tersebut relevan untuk memahami kinerja keuangan entitas. Laporan laba rugi memasukkan semua penghasilan dan beban yang diakui dalam suatu periode, kecuali SAK EMKM mensyaratkan lain. SAK EMKM mengatur perlakuan atas dampak koreksi atas kesalahan dan perubahan kebijakan akuntansi yang disajikan sebagai penyesuaian retrospektif terhadap periode yang lalu dan bukan sebagai bagian dari laba atau rugi dalam periode terjadinya perubahan.

2.2 Akuntansi Koperasi

Koperasi merupakan suatu perkumpulan yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum, yang memberikan kebebasan kepada anggota untuk masuk dan keluar, dengan bekerjasama secara kekeluargaan menjalankan usaha untuk mempertinggi kesejahteraan jasmaniah para anggotanya. Mohammad Hatta mengemukakan bahwa pengertian koperasi adalah usaha bersama untuk memperbaiki nasib penghidupan ekonomi berdasarkan tolong-menolong.

Di Indonesia, pengertian koperasi dirumuskan dalam UU No. 17 tahun 2012 tentang Perkoperasian bab 1 pasal 1 yang berbunyi "Koperasi adalah badan hukum yang didirikan oleh orang perseorangan atau badan hukum Koperasi, dengan pemisahan kekayaan para anggotanya sebagai modal untuk menjalankan usaha, yang memenuhi aspirasi dan kebutuhan bersama dibidang ekonomi, sosial, dan budaya sesuai dengan nilai dan prinsip Koperasi". Dalam rangka memastikan keberlanjutan usaha dan kesehatan keuangan koperasi, maka diwajibkan untuk menyusun laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku.

Standar berfungsi memberikan acuan dan pedoman dalam penyusunan laporan keuangan sehingga laporan keuangan antar entitas menjadi lebih seragam (Martani, 2012). Manajemen dapat lebih mudah menyusun laporan keuangan karena pedoman memberikan ketentuan cara penyusunan tersebut. Dengan berlakunya standar atau aturan, maka akan meminimalisir penyimpangan yang akan terjadi dalam pelaksanaan pencatatan keuangan suatu perusahaan.

Adanya standar yang dapat diterima secara umum, diharapkan dapat mengantisipasi adanya perbedaan dalam mengimplementasikan prinsip-prinsip akuntansi. Standar Akuntansi berisikan pedoman penyusunan laporan keuangan. Standar akuntansi terdiri atas kerangka konseptual penyusunan laporan keuangan dan pernyataan standar akuntansi (Martani, 2012). Kerangka konseptual berisikan tujuan, komponen laporan keuangan, karakteristik kualitatif dan asumsi dalam penyusunan laporan keuangan. Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan (PSAK) berisikan

pedoman untuk penyusunan laporan, pengaturan transaksi atau kejadian, dan komponen tertentu dalam laporan keuangan (Ningtyas & Pusmanu, 2017).

Pengaturan terkait komponen laporan keuangan secara umum berisi mengenai definisi, pengakuan, pengukuran, penyajian, dan pengungkapan. Dengan adanya standar dapat mendorong perkembangan akuntansi khususnya pada koperasi yang akan mengimplementasikan SAK EMKM, laporan keuangan entitas disusun menggunakan asumsi dasar akrual dan kelangsungan usaha, sebagaimana yang digunakan oleh entitas selain entitas mikro, kecil, maupun menengah, serta menggunakan konsep entitas bisnis.

Laporan keuangan entitas terdiri dari: (a) laporan posisi keuangan, (b) laporan laba rugi, dan (c) catatan atas laporan keuangan. Laporan keuangan bertujuan umum merupakan laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan, disusun berdasarkan data dan informasi yang telah terjadi sehingga lebih berorientasi pada data historis (Idris & Syachbrani, 2018).

Pengguna eksternal adalah pemilik yang tidak terlibat langsung dalam pengelolaan usaha, kreditur, dan lembaga pemeringkat kredit, pengajuan pernyataan pendaftaran, pada otoritas pasar modal atau regulator lain untuk tujuan penerbitan efek dipasar modal, serta entitas menguasai asset dalam kapasitas sebagai fidusia untuk sekelompok besar masyarakat. SAK EMKM dimaksudkan untuk digunakan oleh entitas mikro, kecil, dan menengah. Entitas mikro, kecil, dan menengah adalah entitas tanpa akuntabilitas publik yang signifikan, sebagaimana didefinisikan dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas Tanpa Akuntabilitas Publik (SAK ETAP), yang memenuhi definisi dan kriteria usaha mikro, kecil, dan menengah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia, setidaknya tidaknya selama dua tahun berturut-turut (IAI, 2018).

3. METODE

3.1 Desain Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah jenis penelitian yang temuan-temuannya tidak diperoleh melalui prosedur statistik atau bentuk hitungan lainnya. Jenis penelitian yang digunakan adalah studi kasus yaitu penelitian terhadap objek tertentu yang populasinya terbatas sehingga kesimpulan yang diambil berdasarkan penelitian ini hanya terbatas pada objek yang diteliti.

Dalam penelitian ini, peneliti berperan menjadi instrumen kunci. Peneliti sebagai instrumen akan menganalisis laporan keuangan koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel berdasarkan SAK EMKM. Untuk memudahkan perannya, peneliti akan menggunakan instrumen

tambahan berupa pedoman wawancara dan pedoman dokumentasi. Pedoman wawancara merupakan lembaran yang berisi pertanyaan-pertanyaan yang dirancang dan dijadikan acuan peneliti untuk mengetahui sejauh mana penyajian laporan keuangan koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel yang dilakukan oleh pengurus koperasi. Pedoman dokumentasi digunakan untuk menggali data hasil wawancara. Pedoman dokumentasi berkaitan dengan laporan pertanggung jawaban tahun buku 2018.

3.2 Analisis Data

Penelitian ini menggunakan teknik analisis deskriptif yaitu membandingkan teori yang sudah ada dengan praktek yang sesungguhnya sehingga akan dapat ditarik kesimpulan apakah terdapat perbedaan antara laporan keuangan koperasi dengan laporan keuangan menurut SAK EMKM dan mengidentifikasi faktor-faktor penyebab perbedaan.

Langkah-langkah yang akan dilakukan adalah:

- a. Memaparkan laporan keuangan Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan untuk satu periode.
- b. Membandingkan laporan keuangan Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan dengan SAK EMKM.
- c. Menarik kesimpulan apakah laporan keuangan Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan telah sesuai SAK EMKM.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Pengumpulan dan Verifikasi Data

Koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulsel sebagai salah satu entitas nirlaba sudah seharusnya menyusun laporan keuangan sesuai SAK EMKM. Berdasarkan hasil yang diperoleh peneliti selama melaksanakan penelitian, Koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulsel telah menyusun laporan keuangan sejak pelaporan pertama berdirinya koperasi. Tahun 2018 Koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulsel telah menyusun laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban pengurus kepada para anggota dan Dewan Pengawas dana dan rapat anggota. Komponen laporan keuangan yang disajikan belum sesuai dengan SAK EMKM.

Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, Kecil dan Menengah (SAK EMKM) terdiri dari tiga komponen yaitu laporan posisi keuangan, laporan laba rugi, dan catatan atas laporan keuangan. Proses sistem pencatatan yang dilakukan oleh Koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulsel adalah sebagai berikut :

- a. Mengumpulkan bukti-bukti transaksi dari transaksi pengeluaran dan pemasukan.
- b. Setiap transaksi keuangan yang terjadi, pemilik mencatatnya dalam laporan pembukuan.

- c. Mencatat dan membuat laporan pembukuan setiap tahun.

Pemilik mengetahui bahwa laporan pembukuan sangatlah penting untuk mengetahui seberapa detail keuntungan yang diperoleh perusahaan. Pernyataan tersebut juga disampaikan oleh Bapak H. Sailan selaku ketua Koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel pada saat dilakukan wawancara pada tanggal 19 Februari 2020 pada pukul 13.05 WITA.

Berdasarkan hasil penelitian, laporan pembukuan di koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel terdiri dari pengeluaran dan pemasukan transaksi dan pencatatan beban-beban seperti beban gaji, beban listrik, beban pajak. Dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, kecil dan Menengah (SAK EMKM) terdapat beberapa ketentuan yang dapat dipergunakan sebagai pedoman untuk menyusun laporan keuangan koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel.

Koperasi tersebut telah melakukan pemisahan antara aset lancar dan aset tidak lancar, kewajiban jangka panjang dan kewajiban jangka pendek dalam laporan posisi keuangan. Laporan pembukuan koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulsel juga telah melakukan pemisahan antara pendapatan dan beban. Selanjutnya dalam Standar Akuntansi Keuangan Entitas, Mikro, kecil dan Menengah (SAK EMKM) menjelaskan bahwa ada tiga komponen yaitu, laporan posisi keuangan, laporan laba rugi dan catatan atas laporan keuangan. Namun ada beberapa istilah akun yang digunakan masih belum sesuai dengan SAK EMKM.

4.2 Pembahasan

Penyajian laporan keuangan Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulsel ini tidak dilengkapi dengan laporan arus kas. Saat ini, koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulsel telah menerapkan PSAK No. 27 dalam penyajian laporan keuangannya. Akan tetapi, PSAK No. 27 telah dicabut sejak 8 April 2011 dan pernyataan tersebut berlaku efektif untuk periode tahun buku yang dimulai pada atau setelah 1 Januari 2012.

Dengan membandingkan antara laporan keuangan koperasi dengan SAK-EMKM merupakan cara yang paling efektif untuk mengetahui sejauh mana laporan keuangan koperasi dapat dikatakan wajar atau tidak. Di bawah ini merupakan perbandingan laporan keuangan SAK-EMKM dengan laporan keuangan koperasi dilihat dari neraca dan perhitungan hasil usaha.

1. Neraca

Neraca disajikan dalam bentuk skontro yang menyajikan semua pos dan bagian dari pos dalam laporan keuangan dengan posisi pos-pos aset sebelah kiri dan pos-pos kewajiban di sebelah kanan. Pada koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel masih menggunakan

istilah neraca sedangkan berdasarkan SAK EMKM istilah neraca sudah diganti dengan laporan posisi keuangan.

a. Aset Lancar

Penyajian aset lancar disajikan di neraca sesuai dengan pengelompokannya atau aset lancar terdiri dari pos-posnya masing-masing. Pada koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Prov.Sulsel aset lancarnya terdiri dari kas, bank, pinjaman yang diberikan, penyisihan pinjaman, piutang barang cicilan, piutang toko/pulsa, persediaan.

b. Aset Tetap

Aset tetap merupakan harta yang dimiliki oleh Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Prov.Sulsel dalam badan usaha koperasi dinilai berdasarkan harga perolehan sampai aset tetap siap digunakan. Pada koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel aset tetapnya terdiri dari bangunan kantor, akumulasi penyusutan bangunan, inventaris, dan akumulasi penyusutan inventaris.

c. Aset Lainnya

Pada koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel terdiri dari penyertaan pada SMESCO.

d. Kewajiban

Kewajiban di dalam neraca ini yaitu kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang. Kewajiban jangka pendek yang terdiri dari simpanan khusus, simpanan sukarela, bagian laba anggota, simpanan lain-lain, dana-dana, utang dagang. Sedangkan kewajiban jangka panjang yang terdiri dari utang bank dan dana dekon. Kewajiban yang timbul dari transaksi dengan anggota disajikan secara terpisah sebagai hutang kepada anggota. Kewajiban dikeluarkan atau dihentikan pengakuannya ketika kewajiban tersebut telah dilunasi dengan kas atau setara kas dan atau aset non kas telah dibayarkan kepada pihak lain sebesar jumlah yang harus dibayarkan.

e. Ekuitas

Ekuitas yang dimiliki koperasi pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulsel terdiri dari simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, cadangan, dan sisa hasil usaha yang belum dibagi. Di dalam SAK-EMKM dicantumkan bahwa modal saham, tambahan modal disetor, dan saldo laba rugi disajikan dalam kelompok ekuitas dalam laporan posisi keuangan. Dalam pembahasan ini, koperasi menggunakan akun dengan nama simpanan pokok, simpanan wajib, donasi, cadangan dan sisa hasil usaha dimana akun tersebut memiliki karakteristik yang sama dengan modal saham tambahan modal disetor dan saldo laba rugi.

Secara keseluruhan neraca yang dibuat oleh Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulsel sesuai dengan SAK-EMKM karena disusun dengan format yang benar. Tetapi terdapat beberapa akun yang tidak sesuai dengan ketentuan SAK EMKM. Neraca tersebut juga telah menyajikan informasi mengenai aset, kewajiban dan ekuitas Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Provinsi Sulsel per 31 Desember dan neraca disajikan dalam perbandingan dua tahun terakhir.

2. Perhitungan Hasil Usaha

a. Pendapatan

Pendapatan berdasarkan SAK EMKM terdiri dari pendapatan usaha dan pendapatan lain-lain. Sedangkan pendapatan yang dibuat oleh Koperasi Pegawai Dinas Koperasi Prov.Sulsel terdiri dari pendapatan toko dan pendapatan jasa. Pendapatan toko dan pendapatan jasa merupakan pendapatan usaha koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulsel berdasarkan gambaran umum yang ada pada penjelasan laporan keuangan koperasi.

b. Beban

Beban berdasarkan SAK EMKM terdiri dari beban usaha dan beban lain-lain. Sedangkan beban yang dibuat oleh koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Prov. Sulsel seluruhnya merupakan beban usaha.

5. KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan diatas maka dapat disimpulkan bahwa, penyajian laporan keuangan koperasi sudah sesuai dengan format SAK-EMKM karena laporan keuangan koperasi sudah terdiri dari neraca, perhitungan sisa hasil usaha, penjelasan neraca. Namun istilah laporan keuangan yang digunakan oleh koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel belum sesuai dengan standar akuntansi keuangan EMKM seperti laporan posisi keuangan (neraca), laporan laba rugi (perhitungan sisa hasil usaha), catatan atas laporan keuangan (penjelasan neraca).

Standar Akuntansi Keuangan EMKM belum mengatur secara khusus laporan keuangan untuk badan usaha koperasi. Beberapa kendala yang dihadapi oleh koperasi pegawai Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Sulsel dalam menerapkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM), yaitu belum memiliki buku panduan tentang Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro Kecil dan Menengah (SAK EMKM).

Sebagai saran penelitian, pengurus koperasi sebaiknya mengikuti workshop khusus oleh instansi terkait tentang akuntansi perkoperasian agar lebih mengetahui tentang laporan keuangan. Selanjutnya, untuk laporan keuangan periode berikutnya sebaiknya disesuaikan dengan SAK-EMKM. Terakhir, koperasi sebaiknya mempunyai pedoman lain untuk membuat laporan keuangan seperti undang-undang perkoperasian terbaru, prinsip-prinsip keuangan.

6. REFERENSI

- IAI. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idris, H., & Syachbrani, W. (2018). Accountants Moral Judgement in Religious and Non-Religious School Background'S Perspective. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2), 97. <https://doi.org/10.26487/hebr.v2i2.1491>
- Martani, D. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ningtyas, J. D. A., & Pusmanu, P. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM)(Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(1), 11–17.
- Syachbrani, W. (2012). *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Universitas Gajah Mada.
- IAI. (2018). *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*. Jakarta: Salemba Empat.
- Idris, H., & Syachbrani, W. (2018). Accountants Moral Judgement in Religious and Non-Religious School Background'S Perspective. *Hasanuddin Economics and Business Review*, 2(2), 97. <https://doi.org/10.26487/hebr.v2i2.1491>
- Martani, D. (2012). *Akuntansi Keuangan Menengah Berbasis PSAK*. Jakarta: Salemba Empat.
- Ningtyas, J. D. A., & Pusmanu, P. (2017). Penyusunan Laporan Keuangan UMKM Berdasarkan Standar Akuntansi Keuangan Entitas Mikro, Kecil dan Menengah (SAK-EMKM)(Study Kasus Di UMKM Bintang Malam Pekalongan). *Riset & Jurnal Akuntansi*, 2(1), 11–17.
- Syachbrani, W. (2012). *Akuntansi dan Akuntabilitas Pemerintah Desa*. Universitas Gajah Mada.